

ABSTRAK

Nama : Mangara Halomoan
Jurusan : Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pendidikan Ilmu Kepegawaian.
Judul Penulisan : Gambaran Permasalahan-Permasalahan Yang Ada Pada Proses Kenaikan Pangkat Otomatis Di BKPPD Kota Kupang Serta Upaya Penanggulangannya

Salah satu fungsi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) adalah menyelenggarakan penyiapan dan pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah mulai periode Oktober 2017 menerapkan pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) berbasis less paper. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia untuk sektor publik, konsep kenaikan pangkat dapat disetarakan dengan konsep promosi jabatan. KPO merupakan suatu hal yang penting dalam pengembangan karier seorang PNS khususnya PNS Jabatan Pelaksana. Sumber daya manusia yang paling banyak jumlahnya dalam suatu Instansi ialah PNS Jabatan Pelaksana, karena itu perlu menjadi perhatian serius terkait pengelolaannya. Dalam pelaksanaannya BKPPD menghadapi beberapa kendala permasalahan. Secara umum permasalahan tersebut adalah kemutakhiran data dan validitas dari SKP yang dilampirkan oleh PNS yang akan naik pangkat. Terkait permasalahan-permasalahan tersebut melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mendatangkan petugas/pejabat dari Kanreg X BKN Denpasar untuk melakukan pendampingan secara langsung terkait proses KPO PNS daerah Kota Kupang dan menerapkan aplikasi e-Kinerja untuk memudahkan proses perencanaan kinerja, pelaksanaan tugas-tugas, pencatatan kinerja harian PNS dan penilaian kinerja PNS. Dengan aplikasi e-Kinerja ini diharapkan SKP yang menjadi syarat KPO benar-benar SKP yang sesuai dengan fakta kinerja PNS yang bersangkutan.

Kata Kunci: Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)